



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KALURAHAN MAGUWO HARJO
TAHUN ANGGARAN 2025
(LPPKAL MAGUWO HARJO TAHUN ANGGARAN 2025)**



**KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KALURAHAN MAGUWO HARJO
TAHUN ANGGARAN 2025
(LPPKAL MAGUWO HARJO TAHUN ANGGARAN 2025)**



**KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Tujuan Penyusunan Laporan	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus	6
B. Visi dan Misi	6
1. Visi	6
2. Misi	7
C. Strategi dan Kebijakan.....	9
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	14
A. Pendapatan.....	14
B. Belanja.....	14
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.....	14
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	19
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	21
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak	26
C. Realisasi APBKal.....	26
BAB III KEBERHASILAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI	28
A. Keberhasilan	28
B. Permasalahan dan Solusi	28
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
Lampiran 2	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pada Akhir Bulan Desember Tahun 2025
Lampiran 3	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan
Lampiran 4	Data Aparatur Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 5	Kinerja Aparatur Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 6	Data Pengelolaan Kekayaan/Aset Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 7	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 8	Capaian Kinerja Administrasi Dan Data Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 9	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2025
Lampiran 10	LPJ Realisasi Ketahanan Pangan BUMKal Sari Dewi Tahun 2025

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Maguwoharjo Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dalam menjalankan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya. Dokumen ini merangkum seluruh dinamika perjalanan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang telah diupayakan bersama sepanjang tahun 2025.

Sepanjang tahun ini, Kalurahan Maguwoharjo terus berbenah menghadapi tantangan zaman. Fokus kami tetap pada:

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis digital.
- Pembangunan Infrastruktur yang menyentuh kebutuhan riil di setiap Padukuhan.
- Penguatan Ekonomi Lokal melalui pemberdayaan UMKM dan optimalisasi potensi wilayah.
- Peningkatan Kualitas SDM melalui program kesehatan dan pendidikan yang inklusif.

Kami menyadari bahwa segala capaian yang tertuang dalam laporan ini bukanlah hasil kerja keras pemerintah semata, melainkan buah dari sinergi dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Maguwoharjo, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

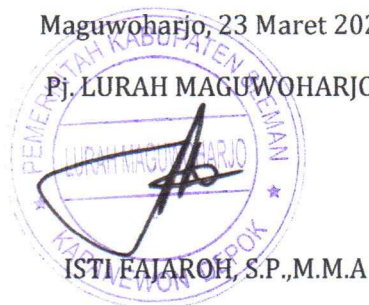
Tentu saja, kami pun menyadari masih terdapat kekurangan dan harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi kritis bagi kami untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi pijakan bagi pembangunan Maguwoharjo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maguwoharjo, 23 Maret 2026

Pj. LURAH MAGUWOHARJO



ISTI FAJAROH, S.P., M.M.A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

1. Tujuan Umum

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Maguwoharjo Tahun Anggaran 2025 disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berikut adalah tujuan umum dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPKal) Maguwoharjo :

a. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas

Tujuan utama LPPKal adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Pemerintah Kalurahan selama satu tahun anggaran. Ini mencakup bagaimana kebijakan diambil dan bagaimana anggaran kalurahan dikelola secara bertanggung jawab.

b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Laporan ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana visi dan misi Lurah Maguwoharjo telah tercapai. Dengan adanya data capaian, pemerintah dapat melihat:

- Efektivitas program kerja yang dijalankan.
- Efisiensi penggunaan anggaran.
- Kendala atau hambatan yang ditemui di lapangan.

c. Sarana Informasi Bagi Masyarakat

Masyarakat Kalurahan Maguwoharjo berhak mengetahui hasil pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi formal pemerintah kalurahan kepada masyarakat mengenai kemajuan wilayahnya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, antara lain meliputi:

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada Bupati
LPPKal merupakan dokumen resmi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program kerja, pengelolaan anggaran, serta tugas pembantuan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.
- b. Sebagai transparansi dan akuntabilitas
LPPKal memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian pemerintah kalurahan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam pembangunan kalurahan.
- c. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi
LPPKal memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja Lurah dan menetapkan kebijakan pembinaan maupun pengawasan lebih lanjut.

B. Visi dan Misi

Gambaran tentang kondisi Kalurahan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan kalurahan yang dijabarkan dalam sejumlah hasil pembangunan yang hendak dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan kalurahan dengan melihat potensi dominan yang dimiliki.

1. Visi

Dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik, maka diperlukan adanya Visi Kalurahan untuk jangka menengah kurun waktu 8 (delapan) tahun. Adapun Visi Kalurahan Maguwoharjo adalah “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT** ”.

Visi tersebut mengandung maksud :

1. MASYARAKAT MAJU : mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kalurahan Maguwoharjo dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah

lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya

2. **MASYARAKAT MANDIRI** : mengandung arti terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, semangat keswadayaan dan gotong royong, mengangkat potensi UMKM, pemanfaatan sumber daya lokal serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **MASYARAKAT BERMARTABAT** : mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kalurahan Maguwoharjo yang dapat dijadikan contoh karena kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi dibuat dalam proses tahapan ingin mencapai sebuah visi yang secara kompleks akan tercapai apabila semua tahapan dan rumusan penyusunan kebijakan misi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Rumusan misi dibuat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan kalurahan. Langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- 1) **Misi Kesatu** : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing.
- 2) **Misi Kedua** : Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- 3) **Misi Ketiga** : Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM

- 4) Misi Keempat : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkan kembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan;
- 5) Misi Kelima : Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan.

Misi Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kalurahan maguwoharjo dengan memperluas lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal dimasa mendatang. Dalam meningkatkan taraf hidup juga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan diimbangi kesadaran hidup bersih dan sehat.

Misi Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah Kalurahan mencapai standar operasional prosedur yang benar dan baik serta mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab mampu meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah Kalurahan meningkatkan daya saing bidang jasa, hasil UMKM dan sektor industri rumah tangga serta potensi Kalurahan lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi Kalurahan yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar lebih menjadi subyek (pelaku) dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta membangkitkan daya saing industri rumah tangga agar semakin kompetitif.

Misi Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kalurahan dalam mendorong, menggerakkan dan menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga mampu mengupayakan peningkatan swadaya serta gotong royong masyarakat. Misi ini juga mengemban upaya mewujudkan harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi antar lembaga Kalurahan dengan unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan program pembangunan Kalurahan Maguwoharjo.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Strategi Kebijakan Sesuai Misi

No.	PRIORITAS MISI KALURAHAN	STRATEGI KEBIJAKAN	KEGIATAN
1.	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing	- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	- Pelatihan MC dan Sambutan Boso Jowo untuk 6 Padukuhan - Pelatihan MUA
		- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	- Rapat koordinasi kader kb kes setiap bulan. - Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) - Penyuluhan Masyarakat Edukasi Gizi
		- Pembentukan LKK (PKK, LPMK, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu	- Pembaharuan SK Kepengurusan - Revitalisasi Kepengurusan karang taruna.

2.	Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	- Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Program	- Publikasi APBKal, realisasi anggaran, dan kegiatan pembangunan secara terbuka (media informasi, papan pengumuman, website) - Penyediaan akses informasi yang mudah bagi masyarakat
		- Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan	- Penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi - Evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan
		- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	- Penyusunan dan implementasi SOP pada seluruh jenis layanan - Penetapan waktu layanan, biaya (jika ada), dan persyaratan yang jelas
		- Peningkatan Integritas dan Disiplin Pamong	- Penegakan kode etik dan disiplin pamong kalurahan - Penerapan reward and punishment secara konsisten
3.	Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM	- Penguatan Sektor Perikanan	- Pengembangan budidaya perikanan (ikan konsumsi dan olahan) - Pembinaan untuk kelompok budidaya perikanan. - Pemberian bantuan pakan ikan
		- Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	- Fasilitasi legalitas usaha - Peningkatan kualitas produk, kemasan, dan inovasi - Pembinaan manajemen usaha dan kewirausahaan

4	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan	- Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	- Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pengurus lembaga - Penguatan kemampuan perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan pelaporan.
		- Optimalisasi Peran Lembaga dalam Pembangunan	- Pelibatan aktif dalam musyawarah kalurahan dan forum-forum partisipatif. - Penugasan peran sesuai fungsi masing-masing lembaga
		- Penguatan Budaya Gotong Royong dan Swadaya	- Pengembangan program padat karya dan kegiatan berbasis swadaya masyarakat. - Revitalisasi kegiatan kerja bakti dan solidaritas sosial.
		- Peningkatan Fasilitasi dan Dukungan Pemerintah Kalurahan	- Penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan lembaga. - Pemberian insentif atau penghargaan bagi lembaga yang berprestasi.
5.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan	- Transparansi Informasi Pembangunan melalui forum musyawarah	- Optimalisasi pelaksanaan muskal, musrenbangkal - Menjamin keterlibatan seluruh unsur masyarakat - Publikasi rencana, anggaran, dan realisasi pembangunan secara terbuka. - Penyediaan media informasi (papan informasi, website, media sosial).
		- Penguatan Peran Pengawasan Berbasis Masyarakat	- Pelibatan BPKal, LPMKal, dan unsur masyarakat dalam monitoring kegiatan.

2. Program pemerintah pusat, pemerintah daerah, program yang masuk Kalurahan

No.	RPJMN, RPJMDaerah Provinsi/Kabupaten	Program	Kegiatan		
			Tematik	Program	Progress
1.	Pengentasan Kemiskinan	- Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) - Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil - Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni - Pelatihan merias untuk keluarga miskin dan rentan miskin	Penyaluran BLT-DD Pencegahan dan penanggulangan stunting Rumah layak huni Pelatihan dan pemberian alat rias	Penyaluran BLT-DD Pemberian PMT bagi Balita dan Ibu Hamil Bedah rumah tidak layak huni Pelatihan rias MUA	Tahun 2025 telah disalurkan kepada 104 KPM Tahun 2025 prosentase stunting 4% (menurun) Tahun 2025 telah dilakukan bedah rumah untuk 2 rumah Tahun 2025 telah diadakan pelatihan rias MUA dengan peserta 16 orang
2.	Tangguh Bencana	- Penanggulan gan bencana alam dan non alam - Pembentukan kalurahan siaga bencana	Peta Resiko Bencana Pembentukan dan pelatihan siaga bencana	Pembuatan Peta Bencana Pembentukan Kalurahan Siaga Bencana	Ketersediaan Peta Bencana dan rambu-rambunya Pelatihan dan pengadaan peralatan siaga bencana
3.	Koperasi Desa Merah Putih	- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Sarana Prasarana KDMP	Pembangunan gedung KDMP	Tersedia Gedung KDMP
4.	Ketahanan Pangan	- Penguatan ketahanan pangan tingkat kalurahan	Budidaya cabe untuk KWT	Penyiapan Lahan	Persiapan

		- Penyertaan modal ke BUMKAL	Budidaya melon dan ayam petelur	Penyiapan lahan serta pembuata GreenHouse	Pembuatan GreenHouse melon organik
5.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum	- Bantuan Hukum untuk aparatur kalurahan dan masyarakat miskin	Posbankum Kalurahan	Pembentukan Posbankum Kalurahan	Tersedianya Posbankum di Kantor Kalurahan
6.	Pemberian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu	- Pemberian bantuan beasiswa	Pemberian bantuan	Pemberian bantuan beasiswa	Tahun 2025 telah diberikan beasiswa kepada 21 orang mahasiswa kurang mampu
7.	Adaptasi perubahan iklim	- Menciptakan pemukiman yang bersih dan asri	Padukuhan kampung hijau	Pemberian stimulan	Tahun 2025 telah terbentuk kampung hijau di 2 padukuhan

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan dalam mengelola keuangan kalurahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan.

A. PENDAPATAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	1.600.000.000	1.760.098.420	110,01
2.	Dana Desa	2.514.690.000	2.514.690.000	100
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	2.750.000.000	2.942.608.750	107
4.	Alokasi Dana Desa	2.169.150.414	2.276.242.125	104,94
5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	2.445.691.500	2.445.691.500	100
6.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000	200.000.000	100
7.	Lain-lain Pendapatan yang sah	50.000.000	31.555.545	63,11

B. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan			
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	106.060.400	31.678.150	29,87
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.434.013.250	1.290.789.191	90,01

113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.544.940	40.189.320	77,97
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset kalurahan, Tunjangan Pembantu Bendahara, biaya operasional lurah dan pamong kalurahan, dll)	885.016.000	582.118.536	65,77
115	Penyediaan Tunjangan BPD	174.750.000	159.250.000	91,13
116	Penyediaan Operasional BPKal (Rapat-rapat , ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	80.263.000	31.034.600	38,67
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	365.525.000	365.525.000	100
118	Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari dana desa	75.400.000	72.580.250	96,26
1190	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	490.253.200	450.714.510	91,94
1191	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	53.684.156	31.311.276	58,32
1192	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Dan Bantuan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan	182.020.000	162.867.500	89,48
1194	Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	500.000.000	7.840.000	1,57
1199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.225.000	0	0

	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan			
121	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	216.390.000	90.968.888	42,04
122	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	143.660.000	46.650.000	32,47
123	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman, gapura,dll)	194.160.000	173.694.500	89,46
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
131	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	41.475.000	14.240.000	34,33
132	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.830.000	9.610.000	69,49
133	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16.660.000	0	0
1390	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	22.025.000	5.750.000	26,11
1391	Pembinaan/sosialisasi/penyuluhan bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	18.900.000	11.600.000	61,38
1392	Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, dll)	72.215.000	46.135.000	63,89
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
141	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan kalurahan /pembahasan APBKal (Muskal, Musrenbangkal /Pra-Musrenbangkal, dll, bersifat reguler)	16.615.000	14.944.500	89,95
142	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)	50.060.000	48.560.000	97,00
143	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	19.480.000	14.841.500	76,19

144	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal / APBKal Perubahan/LPJ APBKal,dan seluruh dokumen terkait)	24.802.500	18.945.800	76,39
145	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.300.000	0	0
146	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur, dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan/ Keuangan)	31.450.000	21.470.000	68,27
147	Penyusunan Laporan Lurah /Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Laporan akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, Laporan keterangan akhir tahun anggaran,informasi kepada masyarakat)	16.090.000	5.979.500	37,16
148	Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.640.000	0	0
1410	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)	49.432.500	0	0
1411	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba	80.200.000	16.000.000	19,95
1491	Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan,dan staf Pamong Kalurahan	93.054.000	41.251.800	44,33
1492	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK,LPMD,Karang Taruna,RT/RW,Posyandu)	9.100.000	0	0
1493	Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	22.415.000	20.000.000	89,23
1495	Pembinaan Pamong Kalurahan di Sub.Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kearsipan	14.250.000	1.600.000	11,23
1497	Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	17.210.000	0	0

1499	Monitoring dan evaluasi kegiatan	26.505.000	12.315.900	46,47
	Sub Bidang Pertanahan			
151	Sertifikasi Tanah Kas Desa	51.950.000	0	0
155	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	5.625.000	0	0
156	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	358.575.000	205.082.594	57,19
157	Penentuan/Penegasan Batas /patok Tanah Kas Desa	33.200.000	2.670.000	8,04
1592	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	230.410.000	111.230.500	48,28
1593	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	100.610.000	62.775.500	62,39
1595	Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	71.959.000	49.314.298	68,53
1596	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	4.228.481.141	0	0
1597	Inventarisasi Tanah Desa	91.820.000	1.700.000	1,85
1599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	52.690.000	8.860.000	16,82

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, telah disusun Peraturan Kalurahan sebagai berikut:

1. Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024
2. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan "Bum Desa Sari Dewi Maguwoharjo"
4. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan "Bum Desa Sari Dewi Maguwoharjo"
5. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Pendidikan			
212	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	108.390.000	98.600.000	90,97
213	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	36.435.000	30.150.000	82,75
215	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal	55.240.000	0	0
216	Pembangunan/peningkatan PAUD/TK/) Madrasah non formal milik desa	140.920.000	0	0
218	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan,Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)	6.075.000	0	0
2110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	65.035.000	59.685.000	91,77
	Sub Bidang Kesehatan			
221	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (penyediaan obat-obatan,penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,peralatan posbindu desa dan posbindu padukuhan ,dst)	9.340.000	0	0
222	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)	197.660.000	165.085.000	83,52
223	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan,kader kesehatan,dll)	39.140.000	19.975.000	51,03
224	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	78.225.000	66.772.200	85,36

226	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL)	4.340.000	0	0
2290	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik nyamuk,dll)	11.670.000	0	0
2299	Lain-lain sub Bidang Kesehatan (Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah data Kependudukan,dll)	19.455.000	0	0
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
231	Pemeliharaan Jalan Desa	91.330.000	0	0
232	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	1.498.215.700	1.474.987.237	98,45
235	Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong,drainase,selokan,pra sarana jalan lain) @.talut jalan	24.749.000	22.729.000	91,84
236	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	36.560.000	0	0
2310	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	31.085.000	29.815.000	95,91
2311	Rehabilitasi/peningkatan/p engerasan jalan lingkungan permukiman/gang @.Konblokisasi	987.929.200	977.559.700	98,95
2313	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	218.194.500	214.641.000	98,37
2314	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	678.566.800	663.846.340	97,83
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
241	Dukungan pelaksanaan program pembangunan .rehap rumah tidak layak huni(RTLH)	38.330.000	0	0
249	Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	61.200.000	0	0

2410	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan **)	31.080.000	21.780.000	70,08
2415	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (penampungan, Bank Sampah, dll)	33.210.000	7.400.000	22,28
2490	Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	15.000.000	0	0
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
252	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	4.000.000	4.000.000	100
2592	Program Kali/ Sungai Bersih / Pembersihan Lingkungan	10.000.000	5.000.000	50
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
261	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	8.050.000	1.350.000	16,77
262	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.600.000	990.000	13,03
	Sub Bidang Pariwisata			
282	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	10.850.000	875.000	8,06

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
311	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.825.000	0	0
312	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	121.545.000	65.360.000	53,77
313	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	30.170.000	0	0

3195	Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan DBKS, Hatinya PKK)	34.950.000	2.275.000	6,51
3199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan Hansip/Linmas (pembelian seragam, pengiriman upacara, pelatihan, honorarium, dll)	380.795.000	163.142.300	42,84
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
321	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.870.000	7.000.000	41,49
322	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	4.700.000	0	0
323	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan	338.335.000	282.820.000	83,59
325	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa **)	0	0	0
3290	Pelaksanaan upacara adat /Peringatan hari jadi Kalurahan (Merti Kalurahan , Merti dusun)	88.980.000	39.300.000	44,17
3291	Fasilitasi pembinaan/ pelatihan/ penyuluhan bagi pengurus tempat ibadah, pengurus agama non formal Kalurahan, Tokoh Agama, dll	85.985.000	71.900.000	83,62
3292	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (pengajian rutin, safari ramadhan/ tarling, jum'at keliling, dll)	48.190.000	30.240.000	62,75
3293	Pelaksanaan pameran/gelar potensi desa (mengadakan sendiri, mengikuti pameran, dll)	52.130.000	0	0

3294	Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal	75.215.000	48.125.000	63,98
3295	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4.775.000	0	0
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
331	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Kalurahan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	25.100.000	0	0
332	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.465.000	0	0
333	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	97.330.000	85.570.000	87,92
336	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.050.000	0	0
3399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
342	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD	81.275.000	73.690.000	90,67
343	Pembinaan PKK	356.135.000	273.377.437	76,76
3490	Pembinaan RT/RW	24.540.000	22.580.000	92,01
3492	Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi lembaga non pemerintah berskala desa(TPA,PAUD,Pengurus tempat ibadah,dll)	31.530.000	0	0
3493	Pembinaan dan Pemberian stimulan kegiatan masyarakat desa (Pengajian akbar,dll)	13.830.000	0	0
3494	Pembinaan dan pemberian stimulan bagi Kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok seni,kelompok tani,kelompok.komunitas masyarakat Kalurahan lainnya)	93.600.000	14.725.000	15,73

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
415	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	27.000.000	18.900.000	70,00
4193	Pelatihan Budidaya Perikanan	96.775.000	79.000.000	81,63
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
422	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0	0	0
423	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0	0	0
425	Pelatihan/Bimtek/Pengenal an Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	0	0	0
426	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana	349.752.000	341.068.000	97,52
4293	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	11.029.832	10.330.000	93,66
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
431	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	95.545.000	92.160.000	96,46
432	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	301.400.000	233.680.000	77,53
433	Peningkatan Kapasitas BPD	67.815.000	60.040.000	88,53
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4490	Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)	9.390.000	0	0
4493	Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah anak (termasuk satgas desa layak anak,Perlindungan perempuan dan anak)	13.960.000	0	0

4494	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa	26.410.000	17.580.000	66,57
4495	Pembinaan /Fasilitasi dan Pemberian penghargaan Bagi Masyarakat berprestasi	10.425.000	0	0
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
452	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	53.538.800	1.300.000	2,43
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
461	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa ,Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal)	2.400.000	900.000	37,50
462	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	5.975.000	0	0
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
472	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	205.685.340	202.360.000	98,38
474	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga,dll)	14.230.000	0	0
4790	Pengelolaan Pasar Desa/ Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa,dll	405.200.000	315.696.223	77,91

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Keadaan Mendesak

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5100	Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000	0	0
	Sub Bidang Keadaan Darurat			
5200	Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000	0	0
	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
5300	Penanganan Keadaan Mendesak	380.950.000	379.375.000	99,59

C. REALISASI APBKal

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran pelaksanaan keuangan Kalurahan selama satu tahun anggaran sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan Kalurahan secara umum telah tercapai dengan baik, yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), transfer pemerintah, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer masih menjadi kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan Kalurahan, yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Pendapatan			
	Pendapat Asli Kalurahan	1.600.000.000	1.760.098.427	160.098.427
	Pendapatan Transfer	10.079.531.914	10.379.232.375	299.700.461
	- Dana Desa	2.514.690.000	2.514.690.000	0
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.750.000.000	2.942.608.750	192.608.750
	- Alokasi Dana Desa	2.169.150.414	2.276.242.125	107.091.711
	- Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	0
	- Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota	2.445.691.500	2.445.691.500	0
	Pendapatan Lain-lain	50.000.000	31.555.545	(18.444.455)
	Jumlah Pendapatan	11.729.531.914	12.170.886.347	441.354.433

2	Belanja			
	Belanja Pegawai	2.996.525.946	2.178.839.947	817.685.999
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	113.310.400	31.678.150	81.632.250
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	2.603.236.450	1.916.411.201	686.825.249
	- Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	105.229.096	71.500.596	33.728.500
	- Tunjangan BPD	174.750.000	159.250.000	15.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	8.954.791.832	6.078.358.015	2.876.433.817
	- Belanja Barang Perlengkapan	1.920.763.632	935.957.085	984.806.547
	- Belanja Jasa Honorarium	1.720.585.000	917.920.000	802.665.000
	- Belanja Perjalanan Dinas	684.635.000	588.780.000	95.855.000
	- Belanja Jasa Sewa	473.960.000	322.735.000	151.225.000
	- Belanja Operasional Perkantoran	1.386.700.000	1.044.923.307	341.776.693
	- Belanja Pemeliharaan	2.119.201.200	1.900.044.623	219.156.577
	- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	648.947.000	367.998.000	280.949.000
	Belanja Modal	7.230.402.481	2.443.250.088	4.787.152.393
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.176.581.141	0	4.176.581.141
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	293.300.000	93.986.888	199.313.112
	- Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	866.905.340	483.832.500	383.072.840
	- Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	990.018.200	986.698.700	3.319.500
	- Belanja Modal Jembatan	0	0	0
	- Belanja Modal Irigasi/Embung / Drainase / Air Limbah /Persampahan	900.597.800	878.732.000	21.865.800
	- Belanja Modal Lainnya	3.000.000	0	3.000.000
	Belanja Tidak Terduga	440.950.000	379.375.000	61.575.000
	- Belanja Tidak Terduga	440.950.000	379.375.000	61.575.000
3	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	9.501.726.959	9.501.726.959	0
	- SILPA Tahun Sebelumnya	9.501.726.959	9.501.726.959	0
	Pengeluaran Pembiayaan	520.000.000	520.000.000	0
	- Penyertaan Modal Desa	520.000.000	520.000.000	0

BAB III

KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. KEBERHASILAN

No.	Prestasi	Tingkat	Keterangan
1.	Juara 2 Lomba Wajah Padukuhan kategori Administrasi dan Keamanan Lingkungan	Kapanewon	
2.	Juara 1 Lomba Wajah Padukuhan kategori Infrastruktur dan Lingkungan	Kapanewon	
3	Juara Lomba Kegiatan Program Inovasi Kalurahan (Gerak Banting / Gerakan Basmi Stunting))	Provinsi	

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun capaian realisasi fisik (%) yang tidak dapat terlaksana secara optimal dan upaya yang akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Operasional BPD	- Belum optimalnya perencanaan kegiatan BPD - Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan belum optimal	- Penyusunan rencana kerja yang terarah - Penguatan koordinasi dan komunikasi
2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	- Aset yang ada sudah usang atau kurang layak pakai - Perencanaan kebutuhan aset belum optimal - Pengelolaan dan pencatatan aset belum tertib	- Perencanaan berbasis kebutuhan (need assessment) - Penertiban administrasi aset - Pemanfaatan teknologi informasi

		- Pemeliharaan aset kurang maksimal	
3	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	- Pemeliharaan belum dilakukan secara rutin dan terjadwal - Kurangnya tenaga teknis atau keahlian - Penggunaan fasilitas yang tinggi tanpa diimbangi perawatan	- Penyusunan rencana pemeliharaan rutin (preventive maintenance) - Prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan - Penguatan kesadaran penggunaan fasilitas - Monitoring dan evaluasi berkala
4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	- Kapasitas SDM aparatur belum merata - Pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital - Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal	- Pengembangan pelayanan berbasis digital - Sosialisasi kepada masyarakat - Penguatan koordinasi dengan instansi terkait
5	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	- Penataan arsip belum tertib dan sistematis - Pengelolaan arsip masih manual - Risiko kerusakan dan kehilangan arsip - Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku	- Digitalisasi arsip - Pemeliharaan dan pengamanan arsip - Penyusunan dan penerapan SOP kearsipan - Monitoring dan evaluasi berkala
6	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	- Administrasi aset belum tertib dan belum terupdate - Penilaian aset belum dilakukan secara akurat - Penggunaan dan pemanfaatan aset belum optimal - Risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset	- Pendataan dan inventarisasi aset secara menyeluruh - Penertiban administrasi aset - Pelaksanaan penilaian aset secara tepat - Penguatan pengamanan dan pengawasan aset - Pemanfaatan sistem informasi aset
7	Sertifikasi Tanah Kas Desa	- Belum seluruh tanah kas desa tersertifikasi - Proses sertifikasi memerlukan waktu lama - Keterbatasan	- Pendataan dan identifikasi tanah kas desa secara menyeluruh - Penertiban dokumen administrasi tanah - Penyelesaian sengketa

		anggaran untuk proses sertifikasi - Potensi konflik atau sengketa lahan	secara musyawarah - Pengamanan dan penandaan aset tanah
8	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan masih rendah	- Peningkatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan - Pengembangan metode penyuluhan yang efektif
9	Inventarisasi Tanah Desa	- Belum adanya pemetaan yang terintegrasi - Potensi tumpang tindih atau sengketa lahan - Penggunaan teknologi informasi belum optimal	- Penyusunan peta desa berbasis data akurat - Penyelesaian batas wilayah secara partisipatif - Penertiban administrasi dan dokumentasi

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ	- Kondisi fasilitas mulai mengalami kerusakan - Pemeliharaan belum dilakukan secara rutin dan terjadwal	- Penyusunan rencana pemeliharaan rutin - Monitoring dan evaluasi berkala
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	- Pengelolaan perpustakaan belum profesional - Keterbatasan sarana dan prasarana - Kapasitas SDM pengelola terbatas	- Peningkatan sarana dan prasarana - Peningkatan kapasitas SDM pengelola - Kemitraan dengan pihak lain
3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	- Kapasitas kader BKB belum merata - Kegiatan BKB belum berjalan rutin dan terjadwal	- Penjadwalan kegiatan secara rutin dan konsisten - Penguatan koordinasi lintas sektor
4	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa	- Kurangnya jadwal pemeliharaan rutin	- Penyusunan jadwal pemeliharaan berkala

5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni	- Data penerima belum akurat dan mutakhir - Harga bahan bangunan yang fluktuatif - Kondisi sosial ekonomi penerima manfaat	- Pemutakhiran dan validasi data secara berkala - Perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil - Pendekatan pemberdayaan bagi penerima manfaat
6	Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	- Kurangnya perawatan rutin - Kebersihan lingkungan kurang terjaga - Minimnya pengawasan	- Penyusunan jadwal pemeliharaan berkala - Penyediaan sarana kebersihan - Pelibatan masyarakat dan karang taruna
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	- Kurangnya perencanaan terpadu - Kapasitas SDM pengelola masih terbatas	- Penyusunan masterplan pengembangan wisata - Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	- Partisipasi masyarakat masih rendah - Koordinasi dengan aparat keamanan belum optimal - Kesadaran keamanan lingkungan masih kurang	- Peningkatan partisipasi masyarakat - Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan - Peningkatan kesadaran masyarakat
2	Pelaksanaan Pameran/ Gelar Potensi Desa	- Koordinasi antar pelaku usaha/UMKM belum maksimal - Kualitas dan variasi produk belum optimal	- Penguatan koordinasi dan pendataan pelaku usaha - Peningkatan kualitas dan kemasan produk
3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	- Minimnya forum komunikasi lintas agama - Kurangnya peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama - Potensi konflik sosial berbasis perbedaan	- Peningkatan edukasi dan sosialisasi toleransi - Penguatan forum komunikasi lintas agama - Fasilitasi dialog dan kegiatan bersama - Pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat

4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	- Kesiapan dan kualitas penampilan belum optimal - Kurangnya pendamping/pelatih profesional	- Peningkatan intensitas dan kualitas latihan - Pelibatan pelatih atau narasumber profesional
5	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	- Minat dan partisipasi pemuda masih rendah - Materi pelatihan kurang sesuai kebutuhan	- Peningkatan minat dan partisipasi pemuda - Penyusunan materi berbasis kebutuhan
6	Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Lembaga Non Pemerintah	- Koordinasi antar lembaga dan pemerintah desa kurang optimal - Partisipasi dan kemandirian lembaga masih rendah	- Penyusunan pedoman penggunaan bantuan - Peningkatan kemandirian lembaga

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak	- Minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak - Belum adanya sistem pelaporan dan penanganan kasus yang jelas - Keterbatasan pendampingan psikologis dan hukum	- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat - Penyusunan sistem pelaporan dan SOP penanganan kasus - Pendekatan sosial untuk mengurangi stigma
2	Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	- Kurangnya publikasi dan apresiasi - Kriteria dan mekanisme penilaian belum jelas - Partisipasi masyarakat dalam pengusulan masih rendah	- Peningkatan publikasi dan eksposur prestasi - Peningkatan partisipasi masyarakat - Penyelenggaraan acara apresiasi secara rutin
3	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	- Pemanfaatan fasilitas belum optimal - Keterbatasan teknologi dan digitalisasi	- Penataan sistem penggunaan sarpras dan pengelolaan bersama - Pelatihan e-commerce, pemasaran digital, dan penggunaan aplikasi

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak

No.	Jenis Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	- Data risiko dan peta rawan bencana belum tersedia - Sistem peringatan dini belum optimal	- Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini berbasis masyarakat - Penyusunan peta rawan bencana dan data wilayah terdampak
2	Penanganan Keadaan Darurat	- Respon awal belum cepat dan terkoordinasi - Data warga rentan belum lengkap	- Pembentukan tim siaga darurat dan penyusunan SOP penanganan - Pendataan kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak)

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo secara umum telah berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan APBKal juga menunjukkan kinerja yang cukup optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman , Kapanewon Depok , BPKal Maguwoharjo, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Maguwoharjo, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kalurahan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBKal, diperlukan saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak. Hal ini penting untuk memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Maguwoharjo, 23 Maret 2026

Pj. LURAH MAGUWOHARJO



ISTI FAJAROH, S.P.,M.M.A